



Media: Minggu Pagi

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Mei 2017

Halaman: 2

Malioboro Kumuh Lagi

PEMDA DIY secepatnya akan mengajak Pemkot Yogyakarta duduk bersama untuk menegaskan kembali kewenangan masing-masing terkait revitalisasi semi pedestrian kawasan Malioboro. Pemda DIY akan segera membicarakan pengaturan kewenangan di kawasan Malioboro dengan Pemkot Yogyakarta agar setelah direvitalisasi tidak menjadi kumuh kembali.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Rani Sjamsinansi, mengaku dirinya sudah menerima banyak keluhan terkait revitalisasi semi pedestrian kawasan Malioboro, yang setelah ditata justru makin marak bermunculan PKL baru maupun parkir-parkir liar. Dia menganggap revitalisasi semi pedestrian kawasan Malioboro menjadi percuma apabila penataan konstruksi sudah dipercantik sedemikian rupa, namun tidak dibarengi dengan penataan PKL, parkir, kebersihan dan lain-lain sehingga tetap terkesan semrawut.

"Saya akan mengundang Sekda Kota Yogyakarta untuk duduk bersama mengenai kewenangan dalam penataan semi pedestrian kawasan Malioboro. Mungkin akan lebih enak apabila kami saling berbagi, dan secara kewenangan apabila ada permasalahan yang belum selesai bisa diselesaikan bersama," papar Rani, seperti dilansir krjogja.com, belum

lama ini.

Masalah Sosial

Menurut Rani, sampai saat ini kewenangan dalam hal revitalisasi semi pedestrian Malioboro tidak mengalami perubahan. Pembangunan konstruksi dilakukan Pemda



DIY yaitu Dinas PUP-ESDM DIY dengan dana menggunakan Dana Keistimewaan (Danais), sedangkan terkait permasalahan sosial termasuk PKL, parkir dan sebagainya ada di tangan Pemkot Yogyakarta. Pemda DIY sudah membantu pembangunan infrastruktur di kawasan Malioboro.

"Melihat kondisi Malioboro saat ini yang sudah ditata tetapi masih tetap semrawut, maka perlu disegerakan duduk bersama dengan Pemkot Yogyakarta, terutama terkait Alun-alun dan kawasan Malioboro. Kalau Alun-alun, pihak Keraton Yogyakarta sudah

mempercayakan kepada Pemda DIY, sedangkan untuk kawasan Malioboro masih sepenuhnya kewenangan Pemkot Yogyakarta," tandas Rani.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY ini mengungkapkan berdasarkan UU Nomor 23 terkait pengelolaan kawasan baik Sultan Ground (SG) maupun Paku Alam Ground (PAG) dan kawasan istimewa memungkinkan dikelola Pemda DIY langsung, pihaknya bisa sepenuhnya mengatur kawasan Malioboro, sembari menunggu rampungnya Perdais teknis Tata Ruang yang hingga saat ini masih terus dimatangkan.

Menurut Rani, baik UPT Malioboro maupun Dinlopas Kota Yogyakarta masih yang berwenang di kawasan Malioboro. Apabila ada keluhan masyarakat baik terkait PKL, parkir, kebersihan dan sebagainya, Pemda DIY siap membantu Pemkot Yogyakarta untuk menyelesaikan problematika tersebut."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005